BAB III

SEJARAH UMUM

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah singkat, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Tinjauan pustaka struktur organisasi dan Uraian Dinas pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat.

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarh singkat berdirinya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat

Saat ini nama dinas PU pengairan di ganti menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan peraturan daerah No.15 Tahun 2000, untuk mengetahui sejarah singkat tentang berdirinya PU pengairan Propinsi Jawa Barat, kita harus mengetahui dasar-dasar dan landasan hukum terbentuknya dinas PU pengairan sejak jaman penjajahan sampai sekarang, Perjuangan Dinas PU telah mengalami 3 (tiga) jaman yaitu :

a. Jaman Penjajahan Belanda

Pada jaman penjajahan belanda yaitu tahun 1883 dibentuk Brigade Irigasi di bawah pimpinan Ir Heskes Setelah itu pada tahun 1889 dibentuk pula bagian irigasi dalam Department Der Burgeliyke Openbare Warken (B.O.W).

Setelah pemerintah Hindia Belanda mendirikan Departement BOW kemudian terjadi perubahan menjadi Department *V En W atau Department Verkeer En Waterstaat Ban West Java* yang berkedudukan di Bandung.Dalam *V En W* ini tergabung didalamnya jawatan pengairan, PTT (Pos Telegraf dan Telephone) dan Jawatan Lalu Lintas Jalan Raya. Khusus tugas di bidang pengairan diatur dalam :

1. *Algemaene Watereglement tahun 1963 (sub 1963 No.489)*
2. *Algemaene Waterbeheerverordening (sub 1957 No.503)*
3. *Provincial Waterglement 1940 No.7*

b. Jaman Penjajahan Jepang

Pada jaman penjajahan jepang, Dinas PU Pengairan Bernama "Doboko jimuso" yang dibentuk serta pembagian susunannya sama seperti jaman *V En W*. Setelah Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan Kemerdekaanya, bentuk dan susunan Doboko Jimuso masih dipakai akan tetapi persoalannya yang dijabat oleh orang-orang Jepang yang diambil alih dengan paksa dan diganti dengan tenaga kerja Indonesia. Setelah keadaan semakin buruk, maka dalam mempertahankan kemerdekaan Bangsa, *V En W* terutama para pemudanya tidak ketinggalan untuk mempertahankan "Gedung Sate" di Bandung sebagai kantor pusat *V En W.*

c. Jaman Setelah Kemerdekaan RI

Pada Tanggal 3 Desember 1945 di kata Bandung terjadi puncak perjuangan fisik Bangsa Indonesia dalam rangka memprtahankan kemerdekaan yang telah di Proklamasikan dari tangan Penjajah Belanda dan Jepang serta mengalami puncak perlawanan yang tidak sedikit menumpahkan darah. Pada pertempuran dari Dinas Pekerjaan Umum telah gugur 7 (tujuh) orang pemuda warga jawatan Pekerjaan Umum untuk mempertahankan Gedung tersebut yaitu *"V En W"*, sekarang dikenal dengan sebutan "Gedung Sate". Oleh karna itu setiap tanggal 3 Desember dijadikan hari Kebangkitan Pekerjaan Umum.

Setelah Negara Republik Indonesia terbentuk RIS dan pemburan Negara Bagian Undang-Undang Nomor 22/1945 tentang Otonomi Daerah termasuk pembentukan Propinsi Jawa Barat tahun 1953 dengan PP No.181/ 1953 dilaksanakan penyerahan tugas-tugas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Otonom, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.22/1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Jawatab ini diberi nama Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat.

Kantor Pusat Dinas Pekerjaan Umum sebelum perang kemerdekaan Bertempat di Gedung Sate Bandung, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dibentuk menjadi 3 (tiga) Dinas yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tinkat 1 Jawa Barat
2. Dinas Pekerjaan Umum Bin Marga Propinsi Daerah Tinkat 1 Jawa Barat
3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tinkat 1 Jawa Barat

Setelah mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya Struktural, Dinas PU Pengairan Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dibentuk berdasarkan peraturan No.4 Tahun 1988 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas PU Pengairan Daerah Tingkat 1 Jawa Barat di Jl.Braga No.137 Bandung dan berdasarkan peraturan Daerah No.15/2000 Dinas PU Pengairan namanya dirubah menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat.

3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pripinsi Jawa Barat

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Sumbar Daya Air Propinsi Jawa Barat yang akan dibahas sebagai berikut :

a. Kedudukan Dinas Sumber Daya Air

Dinas Pengelolaan Sumbar Daya Air berkedudukan sebagai Dinas Daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

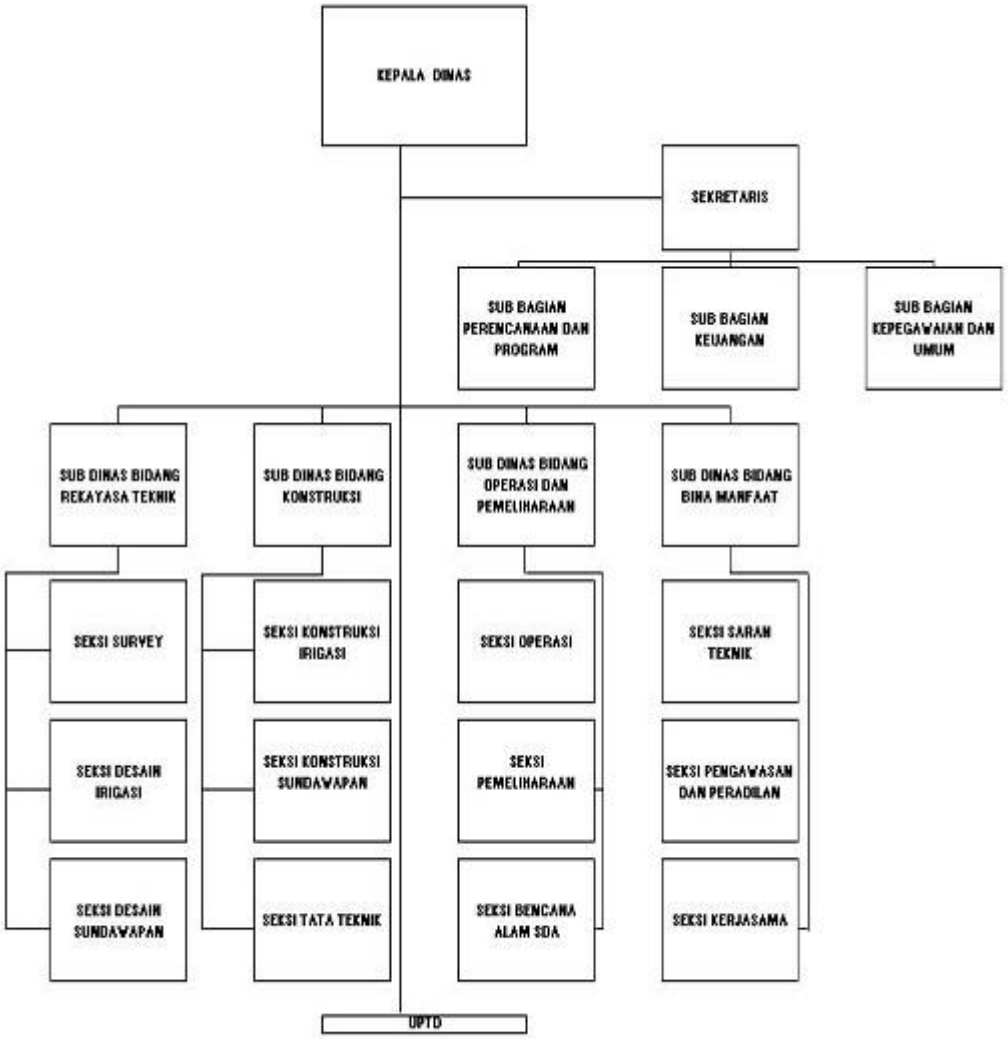
Dinas Pengelolaan Sumbar Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebakan oprasional di bidang sumber daya air yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi propinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi Pengelolaan Sumber daya Air

1. Perumusan kebijakan oprasional dibidang pengelolaan Sumber Daya Air
2. Pembinaan pelaksanaan oprasional dibidang Sumber Daya Air yang meliputi, pembinaan program, pembinaan konversi dan pelestarian, pempinaan teknik, pembinaan pelaksanaan oprasi dan pemeliharaan serta pembinaan pemanfaatan
3. Penyediaan fasilitas dan system investasi pengusahaan Sumber Daya Air
4. Pemberian perizinan pemanfaatan air dan sumber air serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan Sumber Daya Air
5. Pengwasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air
6. Penyelenggaraan tugas-tugas ketatausahaan

3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang baik merupkan hal yang pentingdalam kelancaran jalanya oprasional suatu perusahaan. Biasanya struktur organisasi perusahaan tidak selamanya sama, hal ini tergantung besar kecilnya perusahaan. Susunan organisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Seperti halnya susunan organisasi yang ada pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat, Sebagai berikut :



Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT

3.3 Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Kepala Dinas

Bertugas bertanggung jawab memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas.

b. Wakil Kepala Dinas

Bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan dan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas.

c. Bagian Tata Usaha

Bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum.

d. Bagian Kepegawaian

Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

e. Bagian Keuangan

Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan administrasi keuangan.

f. Bagian Umum

Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan rumah tangga. Perlengkapan umum serta perpustakaan dan kearsipan.